
**MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MELALUI INTEGRASI PENGAWASAN INTERNAL, KOMPETENSI
SDM, DAN SISTEM INFORMASI
(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BULELENG)**

Wenas Yohanes Berchmans¹, Komang Krisna Heryanda², M.Rudi Irwansyah³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha

wenas.yohanes@undiksha.ac.id

Diterima: 14/03/2026

Diterima: 01/04/2026

DiPublikasi: 01/06/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.18.1.2026.75-82>

Abstract

Accountability in regional revenue management is a fundamental element in achieving transparent and responsible public governance. Low levels of accountability in revenue management may reduce public trust in local government performance. This study aims to examine the influence of internal control, human resource competence, and information systems on the accountability of regional revenue management at the Regional Revenue Office of Buleleng Regency.

This research employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 40 employees involved in regional revenue management. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis with statistical software.

The results indicate that internal control and human resource competence have a positive and significant effect on the accountability of regional revenue management. Meanwhile, information systems show a relatively smaller effect, although they still contribute to improving accountability. These findings suggest that strengthening internal control mechanisms and enhancing employee competence are key factors in improving the accountability of regional revenue management.

This study provides practical implications for local governments in improving revenue management through strengthening internal control systems, developing employee competencies, and optimizing the use of information systems.

Keywords: *accountability, internal control, human resource competence, information systems, regional revenue*

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden yang merupakan pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, sistem informasi menunjukkan pengaruh yang lebih rendah meskipun tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan internal dan kompetensi aparatur merupakan faktor utama dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan melalui penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.

Kata kunci: akuntabilitas, pengawasan internal, kompetensi SDM, sistem informasi, pendapatan daerah

**Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)**

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan kewajiban instansi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018; World Bank, 1992). Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel mencerminkan adanya sistem administrasi yang transparan, prosedur kerja yang terstandarisasi, serta mekanisme pengendalian yang efektif.

Pendapatan daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengelolaan yang diterapkan. Pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel mencerminkan adanya sistem administrasi yang transparan, prosedur kerja yang terstandarisasi, serta mekanisme pengendalian yang efektif (Mardiasmo, 2018).

Pengawasan internal merupakan salah satu instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 2013; Sutaryo & Sinaga, 2018). Pengawasan internal yang efektif mampu meminimalkan kesalahan administrasi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengawasan internal juga berperan dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan keandalan laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai akan mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kompetensi aparatur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap kerja yang mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien (Spencer & Spencer, 1993).

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang baik mampu menyediakan data yang akurat dan tepat waktu sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif (Suharyanto & Putra, 2020). Pemanfaatan sistem informasi juga dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah proses pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Akuntabilitas dalam sektor publik menunjukkan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan organisasi dalam menyajikan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya (Mardiasmo, 2018). Pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel ditandai oleh adanya sistem pencatatan yang sistematis, proses pelaporan yang transparan, serta mekanisme pengendalian yang efektif. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal yang efektif mencakup kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengujian terhadap prosedur kerja organisasi (COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 2013). Sistem

**Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)**

pengawasan internal yang baik akan meningkatkan ketertiban administrasi serta menjamin keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia menggambarkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan prosedur administrasi secara tepat serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Peningkatan kompetensi aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan organisasi. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sistem informasi berperan dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi serta ketepatan informasi yang dihasilkan.

Sistem informasi yang berkualitas ditandai dengan keandalan data, kemudahan penggunaan, serta kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan (Suharyanto & Putra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dengan jumlah responden sebanyak 40 pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi, sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil analisis deskriptif

| Variabel | N | Minimum | Maksimum | Rata-Rata | Standar Deviasi |
|----------------------------|----|---------|----------|-----------|-----------------|
| Pengawasan Internal (X1) | 40 | 6 | 14 | 11,07 | 2,299 |
| Kompetensi SDM (X2) | 40 | 6 | 15 | 10,88 | 2,795 |
| Sistem Informasi (X3) | 40 | 6 | 15 | 10,31 | 2,353 |
| Pengelolaan Pendapatan (Y) | 40 | 8 | 15 | 12,24 | 1,936 |

Sumber : data diolah 2025

Tabel statistik deskriptif ini menyajikan gambaran umum tentang data penelitian terhadap empat variabel utama, yaitu Pengawasan Internal (X1), Kompetensi SDM (X2), Sistem Informasi (X3), dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Y), yang diukur melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden dari Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

Variabel Pengawasan Internal (X1) memiliki nilai minimum sebesar 6 dan maksimum sebesar 14, dengan rata-rata (mean) sebesar 11,07 dan standar deviasi sebesar 2,299. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap penerapan pengawasan internal di instansi tersebut. Sementara itu, nilai standar deviasi

**Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)**

yang relatif sedang menunjukkan adanya variasi sedang dalam jawaban responden, artinya tidak semua pegawai memiliki persepsi yang seragam, namun perbedaan tersebut tidak terlalu ekstrem.

Variabel Kompetensi SDM (X2) memiliki rentang skor dari 6 hingga 15, dengan nilai rata-rata sebesar 10,88 dan standar deviasi sebesar 2,795. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kompetensi pegawai cukup baik, meskipun dengan standar deviasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, yang mengindikasikan adanya variasi yang lebih besar dalam persepsi responden. Ini dapat menunjukkan bahwa sebagian pegawai merasa kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan, sementara sebagian lainnya menilai cukup baik.

Variabel Sistem Informasi (X3) menunjukkan nilai minimum 6 dan maksimum 15, dengan rata-rata sebesar 10,31 dan standar deviasi 2,353. Nilai ini mencerminkan bahwa penggunaan dan efektivitas sistem informasi di Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Standar deviasi yang sedang menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang bervariasi di antara responden, yang dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat akses atau keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi.

Sementara itu, variabel Pengelolaan Pendapatan Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 8 dan maksimum 15, dengan nilai rata-rata sebesar 12,24 dan standar deviasi sebesar 1,936. Nilai rata-rata ini termasuk tinggi, yang menunjukkan bahwa secara umum pegawai menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa persepsi responden cukup homogen, atau tidak terlalu berbeda jauh satu sama lain.

Secara keseluruhan, data deskriptif ini menunjukkan bahwa keempat variabel yang diteliti berada pada kategori cukup baik hingga baik, dengan kecenderungan variasi yang tidak terlalu besar antar responden. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng telah menjalankan peran dan fungsi pengelolaan pendapatannya dengan cukup baik, meskipun tetap diperlukan evaluasi lebih lanjut melalui analisis inferensial untuk menguji hubungan kausal antar variabel tersebut.

**Tabel 2
Hasil Uji Normalitas**

| | |
|-------------------------|-------|
| Unstandardized Residual | |
| N | 40 |
| Test Statistic | 0,086 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,200 |

Sumber : Data diolah 2025

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik nonparametrik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat nilai *Asymp. Sig.* yaitu sebesar 0,200. Sesuai dengan kriteria uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka sebaran data pada penelitian ini berdistribusi normal.

**Tabel 3E4XZE3
Hasil uji multikolinearitas**

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| X1 | 0,281 | 3,558 |
| X2 | 0,352 | 2,838 |
| X3 | 0,294 | 3,401 |

Sumber : data diolah 2025

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi antar variabel bebas yang dapat dilihat melalui *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, maka nilai korelasi di antara variabel bebas memiliki kondisi yang lemah, sehingga tidak ada multikolinearitas pada penelitian.

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedasitas

| Model | Sig. |
|---------------------------|-------|
| Pengawasan Internal (X1) | 0,285 |
| Kompetensi SDM (X2) | 0,170 |
| Sistem Informasi (X3) | 0,613 |

Sumber : data diolah 2025

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *Absolute Residual* (ABS) lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini, meliputi analisis regresi linear berganda, uji t, dan koefisien determinan.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji T

| Model | <i>Unstandardized</i> | <i>Standardized</i> | <i>t</i> | <i>Sig.</i> |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------|-------------|
| | <i>Coefficients</i> | <i>Coefficients</i> | | |
| | <i>B</i> | <i>Beta</i> | | |
| <i>(Constant)</i> | 1,309 | | 2,254 | 0,031 |
| X1 | 0,194 | 0,230 | 2,599 | 0,014 |
| X2 | 0,195 | 0,281 | 3,551 | 0,001 |
| X3 | 0,042 | 0,051 | 0,586 | 0,562 |

Sumber : data diolah 2025

Tabel 6 menyajikan hasil analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh tiga variabel independen, yaitu Pengawasan Internal (X1), Kompetensi SDM (X2), dan Sistem Informasi (X3) terhadap variabel dependen Pengelolaan Pendapatan Daerah (Y) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

1. Constant (Intercept)
 - a. Nilai konstanta (B) sebesar 1,309 menunjukkan bahwa jika nilai semua variabel independen adalah nol, maka nilai prediksi akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah adalah sebesar 1,309.
 - b. Nilai $t = 2,254$ dengan signifikansi $0,031 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa konstanta ini signifikan secara statistik dan dapat diinterpretasikan dalam model regresi.
2. Pengaruh X1 (Pengawasan Internal) terhadap Y
 - a. Nilai $B = 0,194$ berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan skor pengawasan internal akan meningkatkan skor akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah sebesar 0,194 satuan, jika variabel lainnya dianggap konstan.
 - b. Nilai Beta (standardized coefficient) sebesar 0,230 menunjukkan bahwa pengaruh X1 bersifat moderat jika dibandingkan dengan X2 dan X3.
 - c. Nilai $t = 2,599$ dan signifikansi $0,014 (< 0,05)$ menunjukkan bahwa pengaruh X1 terhadap Y adalah signifikan secara statistik, sehingga hipotesis bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah diterima.
3. Pengaruh X2 (Kompetensi SDM) terhadap Y
 - a. Nilai $B = 0,195$ menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan skor kompetensi SDM akan meningkatkan skor akuntabilitas pengelolaan pendapatan sebesar 0,195 satuan, jika variabel lainnya tetap.
 - b. Nilai Beta = 0,281 mengindikasikan bahwa X2 memiliki pengaruh paling kuat secara standar di antara ketiga variabel independen.

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)

- c. Nilai $t = 3,551$ dan signifikansi $0,001 (< 0,01)$ menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, sehingga hipotesis bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah sangat didukung secara statistik.
4. Pengaruh X_3 (Sistem Informasi) terhadap Y
 - a. Nilai $B = 0,042$ menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi terhadap pengelolaan pendapatan sangat kecil secara numerik.
 - b. Nilai $Beta = 0,051$ juga menunjukkan pengaruh yang sangat lemah dibandingkan dua variabel lainnya.
 - c. Nilai $t = 0,586$ dan signifikansi $0,562 (> 0,05)$ berarti tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah tidak dapat diterima.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinan

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------|----------|-------------------|
| 1 | 0,961 | 0,923 | 0,909 |

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis model summary, diperoleh nilai R sebesar 0,961, yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel pengawasan internal, kompetensi SDM, dan sistem informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Nilai R Square sebesar 0,923 mengindikasikan bahwa sebesar 92,3% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,909 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, sebesar 90,9% variasi variabel dependen masih dapat dijelaskan secara akurat oleh model. Dengan demikian, model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat tinggi dan relevan untuk digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan pendapatan di Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan ketertiban administrasi serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia juga terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis yang memadai cenderung mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal.

Sistem informasi menunjukkan pengaruh yang lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, namun tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Pemanfaatan sistem informasi membantu meningkatkan kecepatan pengolahan data serta ketepatan informasi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muttaqien et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengawasan internal dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Binawati, 2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian (Yani, A. and Khairina, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Secara simultan, pengawasan internal, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 40 responden pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng, dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan internal,

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)

kompetensi sumber daya manusia, dan sistem informasi memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, yang ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,961 dan R Square sebesar 0,923. Secara parsial, variabel pengawasan internal dan kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan pendapatan, sedangkan variabel sistem informasi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan yang ketat serta kemampuan dan keahlian pegawai merupakan kunci dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan pendapatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Kompetensi SDM menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi akuntabilitas, yang berarti bahwa upaya peningkatan kualitas aparatur, baik melalui pelatihan teknis, penguatan regulasi, maupun pembinaan profesionalitas, sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, meskipun sistem informasi telah diterapkan, pengaruhnya belum signifikan karena kemungkinan masih terdapat kendala teknis maupun kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi oleh pegawai. Oleh karena itu, strategi peningkatan kualitas SDM perlu disinergikan dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis digital.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola keuangan daerah yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: peningkatan efektivitas pengawasan internal, penguatan kapasitas dan profesionalisme pegawai, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Secara teoritis, penelitian ini mendukung literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, terutama dari sisi SDM dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah daerah lainnya dalam memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih akuntabel dan terukur.

Saran

Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng disarankan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas pengawasan internal melalui pelatihan auditor internal, penguatan SOP, serta penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan dan berbasis digital. Penguatan kompetensi SDM juga perlu dilakukan secara sistematis melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan berbasis kinerja, dan peningkatan motivasi kerja pegawai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem informasi, dengan mengidentifikasi kendala teknis, kebutuhan pelatihan pengguna, serta integrasi antarsistem yang masih belum optimal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pengembangan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau komitmen manajemen. Selain itu, dapat pula dilakukan penelitian komparatif antar organisasi perangkat daerah (OPD) atau antar kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Binawati, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal OPTIMAL*, 19(1), 19–39.
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2013). *Internal Control–Integrated Framework: Executive Summary*. New York: COSO.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muttaqien, A. A., Majid, J., & Sari, N. R. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 2(1), 12–27.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Suharyanto, E., & Putra, R. A. (2020). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan

**Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Integrasi Pengawasan Internal, Kompetensi SDM, Dan Sistem Informasi
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng)**

- Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(2), 97–108.
- Sutaryo, & Sinaga, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 1–12.
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.
- Yani, A. and vKhairina, N. 2021. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 150–162.